

Peran Kegiatan Potensi Maritim Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Wilayah Pantai Barat Sumatera Menggunakan *Soft System Methodology*

Muhammad Hultria Guchy

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

e-mail: h34.guchy@gmail.com

Received: 03-08-2020,

Accepted: 13-11-2020

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkewajiban menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TNI AL secara bertahap dan berkelanjutan bersama komponen terkait mulai pusat sampai daerah melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar). Pembinaan potensi maritim tersebut difokuskan terhadap segala ancaman yang ada di masyarakat khususnya paham radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatan potensi maritim dalam mencegah paham radikalisme di wilayah pantai barat Sumatera menggunakan *Soft System Methodology* (SSM). Penelitian ini menggunakan *Soft System Methodology* dengan tujuh tahapan untuk menganalisis peranan potensi maritim dalam pencegahan paham radikalisme. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan potensi maritim melalui komunikasi sosial maritim kepada komponen pemerintah, masyarakat dan keluarga besar TNI antara lain: (1) Pembinaan potensi maritim yang dilakukan oleh dinas potensi maritim (Dispotmar) kepada komponen pemerintah sudah dilaksanakan dalam kegiatan komunikasi sosial melalui kunjungan kerja, *workshop*, dan kegiatan diskusi kenegaraan lain terkait kesejahteraan masyarakat, meskipun kerjasama dan sinergi harus lebih ditingkatkan khususnya dalam menyelesaikan problematika di masyarakat, salah satunya paham radikalisme, (2) Dinas potensi maritim sudah melakukan pembinaan potensi maritim kepada komponen masyarakat melalui beberapa kegiatan, misalnya sosialisasi bahaya *hoax* dan antisipasi menyebarnya paham radikalisme di masyarakat, serta masyarakat berharap kegiatan tersebut terus berkelanjutan, dan (3) Pembinaan potensi maritim sudah sering dilaksanakan kepada keluarga besar TNI melalui pembinaan internal dan penguatan pribadi anggota yang selanjutnya ditularkan kepada pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan paham radikalisme yang masif. Berdasarkan data hasil penelitian, Dispotmar harus lebih meningkatkan potensi maritime, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera guna mencegah paham radikalisme di masyarakat dengan melaksanakan integrasi dan sinergitas antara komponen, berupa memunculkan suatu kesepakatan kata secara tertulis (Buku Petunjuk).

Kata Kunci: Potensi Maritim, Radikalisme, Pantai Barat Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, *Soft System Methodology*

Abstract

TNI is obliged to safeguard the country's sovereignty from all threats under the mandate of the 1945 Constitution and Pancasila. The activities carried out by the Indonesian Navy are gradual and sustainable with related components from the central to the regions through maritime potential development (Binpotmar). The development of maritime potential is focused on all threats that exist in society, especially radicalism. The purpose of this study was to analyze maritime potential activities in preventing radicalism in the west coast of Sumatra using a Soft System Methodology (SSM). This study uses a soft

system methodology with seven stages to analyze maritime potential in preventing radicalism. Data were collected through interviews and observations. The results showed that maritime potential activities through maritime social communication to government components, the community and the TNI extended family include: (1) Maritime potential fostering carried out by the maritime potential service (Dispotmar) to government components has been carried out in social communication activities through work visits, workshops, and other state discussion activities (2) Activities, such as socializing the dangers of hoaxes and anticipating the spread of radicalism in society, and the community hopes that these activities will continue to be sustainable, and (3) Maritime potential development (Binpotmar) has often been carried out by TNI large families through internal coaching and personal strengthening of members who are then transmitted to the government and society in preventing massive radicalism prevention. Based on research data, Dispotmar must increase its maritime potential, especially in the west coast of Sumatra to prevent radicalism in society by implementing integrity and synergy between components, in the form of bringing up a written word agreement (Guidebook).

Keywords: *Maritime Potential, Radicalism, The West Coast of Sumatra, Province of West Sumatra, Soft System Methodology*

Pendahuluan.

Kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang menetap dalam lima pulau besar dan empat kepulauan yang tersebar dalam 34 provinsi perlu disinergikan antara sesama dalam mewujudkan kesatuan dalam NKRI. Pedoman yang perlu dijalankan oleh bangsa Indonesia adalah UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasarnya.¹ TNI selaku aparaturnya berkewajiban menjaga bangsa Indonesia dari segala ancaman, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.

Munculnya beranekaragam ancaman yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Salah satunya terkait maraknya kelompok-kelompok teroris yang berakar dari paham radikalisme. Apabila hal

tersebut tidak segera mendapatkan perhatian, akan dimanfaatkan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan-kepentingan politik di NKRI. TNI AL memiliki tupoksi pertahanan kedaulatan dilaut, melalui Dinas Potensi Maritim (Dispotmar), melaksanakan peran dan fungsinya, berupa kegiatan pembinaan potensi maritim (Binpotmar) secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan Binpotmar merupakan bagian dari kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla), untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat pada sektor kemaritiman.² Kegiatan Binpotmar diprioritaskan dalam mengantisipasi permasalahan di daerah rawan bencana, daerah perbatasan dan permasalahan yang sedang aktual terkait

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

² Buku Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, Skep KASAL/2639/VII/2018, hlm. 12.

munculnya paham radikalisme yang dikhawatirkan menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada acara "*Rapat Koordinasi ANtar Aparat Penegak Hukum*" di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tanggal 29 Agustus 2019, *Brigjend Polisi Ibnu Suhendra* menyampaikan dalam salah satu paparan tersebut, terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat terpapar paham radikalisme. Sulhan (2019) menyampaikan, "Radikalisme menjadi masalah penting akhir-akhir ini bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan rendahnya taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat". Perkembangan radikalisme terlihat dengan maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam di dunia Islam, maka radikalisme sering dipahami dengan kurang tepat yaitu paham yang dianut oleh kelompok-kelompok Islam yang diperjuangkan dengan cara kekerasan dan pemaksaan.

Kekerasan dan pemaksaan tersebut dibuktikan dengan menolak sistem sosial dan politik yang berlaku di masyarakat dan negara yang dianggap tidak berasal dari Islam yang mereka pahami. Selain itu, mereka juga berusaha mengubah sistem sosial, politik, bahkan pemerintahan kepada sistem yang mereka anut dengan cara-cara

kekerasan. Turmudi mengemukakan, "Radikalisme Islam sering ditujukan kepada kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa hanya kelompok mereka yang benar dan mereka sering melakukan kekerasan, seperti penyerangan fisik terhadap kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan mereka, aksi *sweeping*, dan bahkan yang lebih ekstrem adalah aksi bom bunuh diri".³

Permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya paham radikalisme menjadi perhatian khusus dari Dispotmar dalam melaksanakan kegiatan Binpotmar. Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan tersebut harus mengetahui kondisi masyarakat setempat yang memiliki kearifan lokal sendiri. Hal ini bertujuan supaya kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Informasi terkait kondisi factual, yang muncul di sekitar akan lebih baik, jika dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi sosial dan diskusi dua arah.⁴ Sehingga membutuhkan alat yang dapat menganalisis kondisi di masyarakat dan harapan-harapan yang diinginkan. Analisis yang digunakan, alah satunya dengan *Soft System Methodology* (SSM).

Soft System Methodology merupakan model analisis untuk membentuk struktur diskusi dengan objek-objek berbeda, seperti

³ Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 20

⁴ Alo Liliweri, *Konfigurasi Dasar Teori-teori Komunikasi Antarbudaya*, (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 20

kebutuhan, tujuan, ketertarikan, dan suatu nilai yang dapat dipisahkan antar objek tersebut dan mendiskusinya.⁵ SSM pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Tim akademisi dari Universitas Lancaster yang dipimpin oleh *Prof Gwilym Jenkins* pada tahun 1966. SSM digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan melibatkan banyak *stakeholder* di dalam bidang manajemen. Berkaitan dalam mencegah paham radikalisme, bagaimana peran Binpotmar melalui komunikasi sosial maritim kepada masyarakat di wilayah pantai barat Sumatera dengan menggunakan SSM. Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan panduan terkait analisis permasalahan melalui kegiatan Binpotmar dengan menggunakan SSM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan kegiatan Binpotmar dalam mengantisipasi paham radikalisme yang muncul di masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena-fenomena, tanda, gejala yang dialami oleh subjek penelitian. Seperti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dengan

⁵ Barusman M. Yusuf, *Soft System Methodology (SSM): Solusi untuk Kompleksitas Manajemen*, (Lampung, UBL Press, 2017), hl. 70-73.

cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa penjelasan, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara kepada narasumber yang termasuk dalam komunikasi sosial maritim⁷, yaitu Komponen Pemerintah (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat), Komponen Masyarakat yaitu tokoh pendidikan (Kepala SMKN 10 Padang), dan Pejabat yang berwenang terkait Binpotmar yaitu Kadispotmar di wilayah kerja pantai barat Sumatera. Selain itu, observasi dan studi literatur juga menjadi alat pengumpul data yang mendukung wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pantai barat Sumatera, berfokus pada wilayah Sumatera Barat.

Data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis menggunakan *Soft System Methodology* yang terdiri dari tujuh tahapan: Situasi problem yang tidak terstruktur, pernyataan situasi problem, definisi sistem yang relevan, model konseptual sistem sesuai dengan definisi, perbandingan model dengan dunia nyata, perubahan secara sistematis, dan tindakan untuk memperbaiki situasi problem. Berikut

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 8-9

⁷ Buku Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, hlm. 24-30

ditunjukkan gambar tujuh tahapan dalam SSM.⁸



Gambar 1. Tahapan *Soft System Methodology*
 Sumber: Barusman, 2017

Tahapan pada pendekatan SSM yang diperlihatkan pada gambar mencakup:⁹10

1. Mengidentifikasi permasalahan atau situasi yang tidak terstruktur, yaitu menyatakan suatu problem yang membutuhkan analisis problem dan situasi, dengan membiarkan anggapan-anggapan yang beredar tanpa membatasi dan langsung menyimpulkan.
2. Meneliti situasi atau keadaan dan melakukan suatu penyusunan pernyataan permasalahan yang menggunakan analisis unsururnya (dengan metode *Rich Picture*). Hal ini dilakukan untuk menangkap struktur problem, proses yang terlibat dan keterhubungan antara struktur dan proses. Menggambarkan metode *Rich Picture*, berguna untuk mengekspresikan secara grafis atau gambar, mengartikan dan berkomunikasi antara hubungan yang kompleks antara entitas yang berbeda yang terkait dengan masalah yang ada. Gambar

ini didapatkan dari hasil analisa dokumen, wawancara dan diskusi antar aktor yang terkait. Pada akhirnya, diharapkan *Rich Picture* dapat memberikan gambaran yang menyeluruh atau holistik tentang situasi yang dihadapi sesuai tahapan *Soft Sytem Methodology*.

3. Memilih perspektif dan definisikan sistem yang relevan, dilakukan dengan menyatakan *root definition*, yaitu melakukan identifikasi elemen situasi dan pihak yang terlibat dengan menggunakan CATWOE. Elemen analisis dalam CATWOE mencakup:¹⁰11

- a. **Customers**, menyatakan pihak yang terkena dampak/diuntungkan dari aktivitas yang dilakukan.
- b. **Actors**, menyatakan pihak yang terlibat dalam aktivitas.
- c. **Transformation Process**, menyatakan aktivitas yang bertujuan mengubah input menjadi output.
- d. **Weltanschauung**, suatu cara pandang yang menyeluruh sehingga root definition memiliki arti dalam konteksnya.
- e. **Owners**, menyatakan pihak yang dapat menghentikan aktivitas.
- f. **Environmental Constraints**, merupakan batasan yang dapat mempengaruhi situasi.

⁸ M. Yusuf Barusman , *Soft System Methodology (SSM): Solusi untuk Kompleksitas Manajemen*, (Lampung, UBL Press, 2017), hl. 70-73

⁹ Ibid, hlm. 73

¹⁰ Peter Checkland & Poulter, J., *Learning for action: a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioner, teachers, and students* (Chiciester: Wiley, 2006), hlm. 110-112

4. *Root Definition* merupakan pernyataan singkat yang tidak ambigu, dengan cara menspesifikasikan *Owners* (O), *Transformation Process* (T) dari sistem yang ingin dicapai oleh *Actors* (A), pemilik *World View/ Weltanschauung* (W) yang menjadikan suatu transformasi sebagai proses yang berarti, begitu juga *Customer* (C), dan *Environmental Constraints* (E) pada transformasi sistem, sesuai dengan batasan yang dipilih.

5. Mengembangkan suatu model konseptual sistem, sesuai dengan definisi, yang dibangun dengan cara mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang harus ada untuk menjalankan *tasks* yang dinyatakan dalam *root definition*.

6. Membandingkan suatu model dengan dunia nyata, yaitu membandingkan suatu konsep konseptual dengan kenyataan. Dimana model konseptual dianggap sebagai bentuk ideal yang memberikan inspirasi, bukan sebagai kritik atau ancaman.

7. Mendefinisikan perubahan yang akan diimplementasikan secara sistematis, yaitu mendefinisikan dan menyeleksi pilihan-pilihan.

Hasil dan Pembahasan

Soft system methodology yang digunakan sebagai alat analisis terdiri dari tujuh tahapan menunjukkan, bahwa kompleksitas permasalahan yang ada di masyarakat provinsi Sumatera Barat lumayan tinggi, akan tetapi

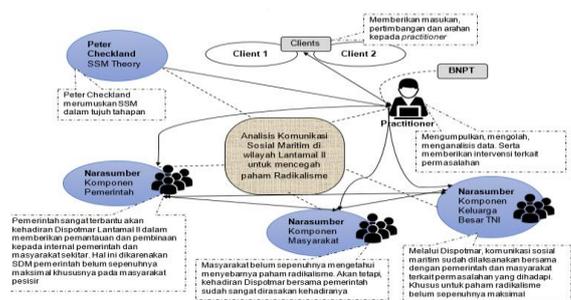
perihal paham radikalisme belum sepenuhnya mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat dan pihak Dispotmar. Sehingga solusi yang sesuai dapat diperhitungkan menggunakan SSM, secara detail dijelaskan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi Permasalahan.

Permasalahan yang menjadi fokus utama adalah terkait Binpotmar sebagai upaya pencegahan paham radikalisme di wilayah Sumatera Barat berdasarkan data dari BNPT.

2. Pernyataan Situasi Problem.

Pernyataan situasi atau keadaan dengan menyusun pernyataan permasalahan, menggunakan analisis unsur-unsurnya dengan metode *Rich Picture*. Hal tersebut dilakukan untuk menangkap struktur problem, proses yang terlibat dan hubungan antara proses dan strukturnya. Gambaran ini didapatkan dari hasil analisa dokumen, wawancara dan diskusi dengan aktor yang terkait. Berikut *rich picture* pada gambar;



Gambar 2. *Rich Picture*

Sumber: wawancara dan Teori P. Checkland

3. Membuat *Root Definition* untuk melakukan identifikasi elemen situasi dan pihak yang terlibat dengan menggunakan *CATWOE*.

Tabel 1. Root Definition

RD	Bentuk pernyataan	Relevant System
RD 1	Kegiatan Binpotmar oleh Dispotmar bersama komponen Pemda/Pemprov Sumbar untuk mencegah paham radikalisme di wilayah kerja pantai barat Sumatera dengan menggunakan SSM	Binpotmar terkait upaya pencegahan paham radikalisme (P), dengan melaksanakan beberapa aktivitas dalam kegiatan di Dispotmar bersama pemerintah (Q) untuk mencegah paham radikalisme (R)
RD 2	Kegiatan Binpotmar oleh Dispotmar bersama komponen masyarakat Sumbar untuk mencegah paham radikalisme di wilayah kerja pantai barat Sumatera dengan menggunakan SSM	Binpotmar terkait pencegahan paham radikalisme (P), dengan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat khususnya masyarakat (Q) untuk mencegah tersebarnya paham radikalisme (R)
RD 3	Kegiatan Binpotmar oleh Dispotmar bersama komponen keluarga besar TNI di wilayah Sumbar untuk mencegah paham radikalisme menggunakan SSM	Binpotmar terkait bahaya paham radikalisme dan pencegahannya (P) bersama dengan internal TNI (Q) untuk memberikan pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan paham radikalisme (R)

Selanjutnya melakukan analisis CATWOE terhadap setiap *root definition* yang sudah dibuat, berikut penjelasannya:

Tabel 2. Analisis RD 1 dengan CATWOE

ANALISIS CATWOE	
<i>Customer</i>	Komponen Pemerintah
<i>Actor</i>	Dispotmar
<i>Transformation</i>	Binpotmar melaksanakan Kegiatan kunjungan dan silaturahmi melalui kegiatan seminar dan <i>workshop</i> kepada pemerintah oleh Dispotmar
<i>Worldview</i>	Dispotmar diharapkan dapat terus melaksanakan Binpotmar dengan melibatkan dan bekerjasama dengan pemerintah, hal ini sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat terkait problematika di masyarakat khususnya bahaya paham radikalisme.
<i>Owners</i>	Kadispotmar dan Kadis DKP Prov. Sumbar
<i>Environment</i>	Intensitas yang tinggi dalam melaksanakan binpotmar melalui kegiatan-kegiatan yang sering diadakan Dispotmar ataupun pemerintah, seperti kegiatan PHBN dan PHBI dapat mempengaruhi internal pemerintah untuk selalu meningkatkan cinta tanah air

Tabel 3. Analisis RD 2 dengan CATWOE

ANALISIS CATWOE	
<i>Customer</i>	Komponen Masyarakat
<i>Actor</i>	Dispotmar

<i>Transformation</i>	Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan kepada masyarakat melalui beberapa tokoh masyarakat dan pendekatan kepada masyarakat pesisir. Misalkan sosialisasi kepada generasi muda di sekolah sebagai ujung tombak masyarakat dalam upaya mencegah paham radikalisme
<i>Worldview</i>	Dispotmar memberikan Binpotmar kepada masyarakat melalui generasi muda yang sangat membantu masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang bahaya hoax dan nasionalisme sebagai upaya menangkal hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat khususnya paham radikalisme
<i>Owners</i>	Dispotmar dan Kepala SMKN 10 Padang
<i>Environment</i>	Kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, baik kegiatan yang bersifat ringan dan besar dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan oleh Dispotmar bersama instansi yang lain guna mencegah sejak dini penyebaran paham radikalisme di masyarakat

Tabel 4. Analisis RD 3 dengan CATWOE

ANALISIS CATWOE	
<i>Customer</i>	Komponen Keluarga Besar TNI
<i>Actor</i>	Dispotmar
<i>Transformation</i>	Pelaksanaan Binpotmar dalam memberikan pengawasan dan pemantauan kepada komponen lain, sebelumnya sudah melakukan pembinaan secara internal, selanjutnya memberikan pembinaan komsos melalui

	kegiatan sosialisasi, <i>workshop</i> , pelatihan dan kegiatan <i>outdoor</i> kepada pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat maraknya paham radikalisme
<i>Worldview</i>	Informasi yang didapatkan dari BNPT menjadi prioritas bersama antar setiap komponen dalam komunikasi sosial maritim, utamanya menjadi fokus Dispotmar, karena bertanggungjawab memberikan pertahanan kepada masyarakat bersama dengan instansi terkait perihal pencegahan paham radikalisme
<i>Owners</i>	Kadiispotmar
<i>Environment</i>	Kegiatan yang dilaksanakan melalui Binpotmar lebih ditingkatkan, khususnya terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang belum menemukan solusi khususnya terkait pencegahan paham radikalisme

4. Model konseptual menjadi tahapan selanjutnya dalam SSM. Model konseptual yang difokuskan pada penerapan proses *transformation* (dalam *CATWOE*). Pada RD 1 terdapat empat aktivitas, RD 2 empat aktivitas, sedangkan RD 3 enam aktivitas yang dengan harapan dapat menjadi solusi permasalahan.

5. Perbandingan model konseptual dengan realitas bertujuan untuk mengaitkan antara model solusi melalui beberapa aktivitas yang sudah dibuat dengan realita yang ada.

Secara keseluruhan, dalam aktivitas di RD 1 antara model konseptual dan realita hanya ada tiga yang sesuai. Selanjutnya pada RD 2 terdapat dua aktivitas yang sesuai, sedangkan RD 3 terdapat lima aktivitas yang sesuai dengan realita.

Pembinaan potensi maritim yang dilakukan oleh Dispotmar kepada komponen pemerintah sudah dilaksanakan berupa kegiatan komunikasi sosial melalui kunjungan kerja, *workshop*, dan kegiatan diskusi kenegaraan lain terkait kesejahteraan masyarakat, meskipun kerjasama dan sinergi harus lebih ditingkatkan khususnya dalam menyelesaikan problematika di masyarakat, salah satunya paham radikalisme. Selanjutnya, pembinaan potensi maritim kepada komponen masyarakat melalui beberapa kegiatan, misalnya sosialisasi bahaya hoax dan antisipasi menyebarnya paham radikalisme di masyarakat, serta masyarakat berharap kegiatan tersebut terus berkelanjutan. Komponen yang terakhir adalah keluarga besar TNI, proses pembinaan potensi maritim melalui pembinaan internal dan penguatan pribadi anggota yang selanjutnya ditularkan kepada pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan paham radikalisme yang masif.

Penutup

Penarikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya memuat beberapa alternatif dan rekomendasi untuk

dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak terkait.

a. Pelaksanaan kegiatan Binpotmar oleh Dispotmar bersama komponen pemerintah (DKP Sumbar), meliputi beberapa aktifitas kemaritiman yang didalamnya berkaitan dengan aktifitas sehari-hari kehidupan masyarakat provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pembinaan tersebut saat ini, masih terbilang sebatas kegiatan normatif, begitu juga halnya program dari DKP provinsi Sumbar bersama Dispotmar. Pelaksanaan kegiatan silaturahmi dan diskusi tentang permasalahan yang ada di masyarakat telah berjalan, akan tetapi secara faktual dilapangan masih kurang optimal.

b. Pelaksanaan kegiatan Binpotmar oleh Dispotmar kepada komponen masyarakat masih bersifat formal dan belum menyeluruh kesemua lapisan masyarakat. Kegiatan pembinaan potensi maritim yang dilaksanakan, berupa penyuluhan, pembekalan dan pembinaan kepada mitra usaha masyarakat tentang pedoman serta aturan dilaut. Begitu juga dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya *hoax* dan bahaya paham radikalisme telah dilaksanakan. Sejauh ini, kegiatan telah melibatkan tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang berkompeten di lingkup masyarakat.

c. Pelaksanaan kegiatan Binpotmar dalam komponen keluarga besar TNI telah berjalan dengan baik. Kegiatan pembinaan tersebut berupa anjingsana, diskusi dan silaturahmi kepada keluarga besar TNI yang veteran/masih aktif. Dispotmar merupakan bagian dari TNI, oleh karena itu tali persaudaraan kepada komponen keluarga besar TNI sedapat mungkin terus terjalin. Melalui komponen ini, tugas pembinaan potensi maritim akan semakin mudah tercapai, karena komponen tersebut, tersebar di wilayah kerja pantai barat Sumatera dan selalu berdampingan/membaur didalam lingkungan masyarakat.

Tulisan diatas memunculkan suatu novelty, berupa sinergitas dan integritas antara komponen yang bersifat terpadu dan terarah dengan menciptakan kata sepemahaman serta kesepakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritime dengan membuat suatu buku petunjuk (Bujuk)

kesepahaman strategi dalam mencegah paham radikalisme, dalam hal ini Dispotmar di wilayah pantai barat Sumatera sebagai ujung tombaknya.

Referensi

- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.
- Buku Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (2018)
- Barusman, M. Yusuf S. (2017) *Soft System Methodology (SSM): Solusi untuk Kompleksitas Manajemen*, Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Checkland, P., & Poulter, J. (2006). *Learning for action: a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioner, teachers, and students* (Vol. 26). Chichester: Wiley.
- Turmudi, E. (2005) *Islam dan Radikalisme*, Jakarta: LIPI Press.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Liliweri, A. (2016) *Konfigurasi Dasar Teoriteori Komunikasi Antarbudaya*, Bandung: Nusa Media.